



Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Identitas Islam Dalam Pemilihan Umum 2024

Dwi Wulan Sari¹, Maksudin², Sibawaihi³, Aulia Mutiara Putri⁴

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2,3}
Universitas Muhammadiyah Metro⁴

dwiwulansari76@gmail.com¹⁾, maksudin@uin-suka.ac.id²⁾
sibawaihi@uin-suka.ac.id³⁾, auliatiara13@gmail.com⁴⁾

Abstrak

Politik identitas Islam sering kali dijadikan sebagai alat perjuangan yang digunakan suatu kelompok dalam mendukung saat masa kampanye. Tidak sedikit yang akhirnya memilih pemimpin karena doktrin atas persamaan agama. Mahasiswa dalam politik identitas mempunyai peran dan partisipasi yang besar dalam melakukan perjuangan dalam membantu menyelesaikan kasus intoleransi dan diskriminatif yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa adanya politik identitas Islam dalam pemilihan umum akan sangat berpotensi memunculkan konflik serta perpecahan dalam masyarakat. Jika politik identitas Islam dibiarkan tumbuh berkembang dalam keseharian kelompok masyarakat serta saling menjatuhkan satu dengan lainnya maka besar dampaknya dapat merusak kebhinekaan. Pemilihan umum menjadi kesempatan baik bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama bagi mahasiswa. Bukan hanya terpilihnya pemimpin yang bijaksana, namun kesuksesan demokrasi menjadi harapan yang dinantikan. Peran ini tidak hanya dibebankan pada mahasiswa, namun juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya kerja sama dalam menciptakan persepsi dan pelaksanaan politik yang bebas dari kepentingan kelompok dan mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas.

Kata Kunci: Mahasiswa, Politik Identitas Islam, Pemilihan Umum

Abstract

Islamic identity politics is often used as a means of struggle used by a group to support the campaign period. Not a few end up choosing leaders because of the doctrine of religious equality. Students in identity politics have a big role and participation in carrying out the struggle to help resolve cases of intolerance and discrimination that occur. This study uses a qualitative method. Based on the research results, it can be understood that the existence of Islamic identity politics in general elections will have the potential to create conflict and division in society. If Islamic identity politics is allowed to grow and develop in the daily lives of community groups and bring down one another, then the big impact can damage diversity. The general election is a good opportunity for all Indonesian people, especially for students. It is not only the election of wise leaders, but the success of democracy is the hope to look forward to. This role is not only borne by students, but also for all Indonesian people. The importance of cooperation in creating the perception and implementation of politics that is free from group interests and realizing quality general elections.

Keyword: Students, Islamic Identity Politics, General Elections



PENDAHULUAN

Seiring dengan terjadinya perubahan sosial, politik identitas dianggap semakin memberikan pengaruh dalam membentuk dinamika politik diberbagai negara. Konflik atau perselisihan yang sering terjadi dikarenakan adanya perbedaan identitas kelompok dan latar belakang yang memiliki kepentingan. Perbedaan dari setiap masing-masing kelompok tersebut pada akhirnya saling bersaing untuk memperoleh kekuasaan serta mempengaruhi kebijakan publik. Di Indonesia politik identitas Islam sering diartikan sebagai praktek politik yang buruk, dikarenakan adanya penerimaan dan penolakan dari seseorang atau kelompok sosial tertentu yang dilandaskan pada identitas. Landasan tersebut didasarkan pada fakta sosial yang berlaku, seperti memilih pemimpin dari kelompok identitas atau konflik sosial politik yang sama (Mali, 2021)

Menjelang pemilihan umum mendatang, politik identitas Islam dijadikan sebagai alat perjuangan yang digunakan suatu kelompok dalam memperjuangkan keinginannya. Tidak sedikit yang akhirnya memilih pemimpin karena paham asal usul keluarga calon pemimpinnya. Sebenarnya, politik identitas tidak selalu memiliki kesan negatif apabila digunakan dalam takaran yang sesuai, politik identitas akan memiliki citra buruk jika dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat serta mengakibatkan kekacauan. Politik identitas Islam dapat memunculkan sikap toleransi serta kebebasan jika saling memberikan pengakuan atas berbagai perbedaan dan keberagaman. Jika politik identitas Islam dimainkan dengan cara yang tidak baik maka akan mengakibatkan sebuah masyarakat yang terpecah belah, hilangnya kerukunan hingga tidak memiliki rasa empati untuk saling peduli. Munculnya sifat mudah terprovokasi, mudah tersinggung, tersulut emosi dan persilihan yang datang. Jika berkaca pada kejadian di tahun 2016 silam terkait masalah penistaan agama yang ditujukan pada salah satu gubernur Jakarta. Maka munculnya kegaduhan dan opini publik tentang pro serta kontra untuk memilih pemimpin menjadi opini yang besar (Anam, 2019).

Jika melihat dari beberapa peristiwa tersebut, maka politik identitas memang masih menjadi bagian yang diminati oleh elit politik terlebih menyelipkan agama sebagai syarat dalam meraup suara pemilih. Kopko menyebutkan bahwa agama memiliki pengaruh besar dalam keikutsertaan politik. Sebagaimana contohnya terkait dilarangnya aktifitas politik di gereja hal ini disebabkan karena bersifat keduniawian, maka hasil dari aturan tersebut berefek pemilik politik gereja yang rendah (Saputro, 2018). Mahasiswa dalam politik identitas mempunyai peran dan partisipasi yang besar dalam melakukan perjuangan dan isu yang dijadikan sebagai ujung tombak dalam membantu menyelesaikan kasus intoleransi dan diskriminatif yang bertentangan dengan hukum serta demokrasi (Khakim et al., 2020). Gerakan yang seringkali dikaitkan dengan mahasiswa ialah fenomena yang berupaya dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan serta perbedaan etnis. Mahasiswa seringkali dihadapkan sebagai motor penggerak dalam membangkitkan kesadaran sosial terhadap isu-isu identitas dalam masyarakat.

Terdapat sejumlah perguruan tinggi negeri yang mahasiswanya banyak mendukung aksi radikalisme. Hal ini terungkap dari proses studi yang dilakukan pada lembaga Kampus Islam dalam proses survei tersebut melibatkan kurang lebih 2.466 sampel siswa yang dihimpun dari berbagai sumber ternama di Indonesia. Terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan kepada siswa seperti, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk penyuluhan yang tidak bermoral. Total 65% atau sekitar 1.594 responden memberikan jawaban mendukung terhadap pelaksanaan penyuluhan tidak bermoral, sedangkan sekitar 18% atau kurang lebih 446 responden ikut secara aktif dalam kegiatan sweeping. Kemudian, sekitar 11% memilih untuk tidak mendukung kegiatan sweeping serta terdapat 158 responden yang enggan memberikan jawaban (Irwan, 2019).

Terdapat beberapa alasan mengapa agama seringkali dijadikan sebagai pembenaran dalam perbuatan tindak kekerasan. *Pertama*, agama berfungsi sebagai ideologi. *Kedua*, agama berfungsi sebagai identitas serta *ketiga* agama dijadikan sebagai legitimasi etis yang menghubungkan antar umat manusia. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, maka potensi agama untuk turut andil dalam tindak kekerasan akan semakin terbuka. Jika akhir-akhir ini semakin banyak politik identitas Islam yang seringkali disimbolkan dengan aksi intoleransi dan mengaburkan nilai ajaran agama. Maka sudah seharusnya watak dari keberagaman dapat diwujudkan dengan keramahan, moderat serta sikap toleransi dan bukan sebaliknya.

Sejumlah penelitian berkaitan dengan penelitian persepsi mahasiswa tentang politik identitas Islam menjelang pemilihan umum belum pernah dilakukan, baik oleh lembaga maupun individu. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai sumber rujukan oleh peneliti seperti penelitian yang dilakukan oleh Syafitri Irwan berjudul *Islam dan Politik Identitas: Studi Tentang Pemahaman Nilai-nilai Pendidikan Islam* (Irwan, 2019). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa munculnya gerakan Islam radikal di Indonesia dipengaruhi dengan adanya situasi transisi politik setelah jatuhnya rezim orde baru yang otoriter. Setidaknya terdapat dua gerakan yang mempengaruhi yaitu DI /TII dan partai Masyumi. Perjuangan



yang dilakukan oleh organisasi Islam seperti FPI berupaya untuk memperjuangkan syariat Islam agar tetap menerima pancasila, UUD 1945 dan NKRI yang berfungsi sebagai landasan dalam bernegara.

Selanjutnya yaitu penelitian Amrullah Umar dan Suyatno Kahar yang berjudul *Pengaruh Politik Identitas Pada Pemilihan Presiden 2019 (Survey Terhadap Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara)* (Amrullah & Kahar, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur berapa persen yang memilih pemimpin dan pengaruhi oleh politik identitas pada tahun 2019. Setelah mendapatkan hasilnya, maka data selanjutnya digunakan untuk mengetahui dampak yang disebabkan atas politik identitas secara umum. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan survey dan angket tertutup sebagai sumber alat pengumpul data utama. Analisis data deskriptif digunakan untuk menggambarkan jawaban dari sampel penelitian terhadap angket atau kuisioner yang diberikan.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka penelitian tentang persepsi mahasiswa PBA terhadap politik identitas Islam dalam pemilihan umum belum pernah dilakukan, maka dari itu pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa terhadap politik identitas Islam dan seberapa pentingnya menjelang pemilihan umum di tahun 2024.

METODE

Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode survei kualitatif digunakan untuk memetakan pemahaman dan pandangan mahasiswa terhadap politik identitas. Lokasi penelitian yaitu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada program studi PBA atau pendidikan Bahasa Arab. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melalui beberapa informasi yang diperoleh dari buku, makalah, jurnal dan penelitian lainnya yang terkait dengan fokus yang diteliti. Data yang telah diperoleh seluruhnya maka selanjutnya akan dianalisis kemudian direfleksikan dengan kahain teoritik yang ada. Berdasarkan keseluruhan informan, terdapat presentase 71,4% perempuan dan 28,6% laki-laki dengan 100% beragama Islam. Terdapat 85,7% berlatar belakang dengan etnis Jawa dan 14,3% etnis Banjar. Penelitian ini nantinya memberikan persepsi mahasiswa terhadap politik identitas Islam dalam pemilihan umum tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Identitas Islam

Fenomena politik identitas Islam telah terjadi sejak lama, yang dimulai sekitar abad ke-16 dan ditandai hadirnya kerajaan Islam di Nusantara. Hadirnya kerajaan Islam yang masuk di Nusantara merupakan simbol kekuatan politik Islam untuk mengusir penjajah. Sebagai contoh, sebuah kerajaan Islam yang berada di Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Ratu Kalinyamat yang sangat memiliki peran dalam aksi solidaritas ini. Berdasarkan kisah yang dihimpun pada era kolonialisme, terdapat empat ratus armada kapal yang dihubungkan ke Malaka untuk membantu kerajaan untuk berperang dan melakukan perlawanan pada bangsa portugis. Selain itu, terdapat perjuangan Jepara yang mengakomodir ekspedisi perang antara kerajaan Aceh dengan Ternate-Tidore. Puncak politik identitas Islam yaitu ketika terjadinya perang Diponegoro yang terjadi pada tahun (1825-1830). Ketika terjadinya peperangan tersebut, maka seluruh simbol keagamaan dikeluarkan sebagai wujud kekuatan bagi umat Islam dalam melawan bangsa Belanda. Para panglima perang juga mendapatkan gelar islami yang disematkan serta menggunakan sorban atau jubah saat perang berlangsung.

Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang telah dipraktekkan memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam dan bagian dari politik identitas Islam. Terdapat beberapa alasan mengapa demokrasi yang dipraktekkan oleh bangsa Indonesia memiliki klaim sebagai politik identitas muslim, meski awal kemunculannya dipengaruhi oleh budaya Barat yang berusaha mempengaruhi, namun unsur penting dari santri tidak dapat dihilangkan dari sejarah seperti tokoh Sukiman Wirjosendjojo, Wahid Hasyim, Jusuf Wibisono, Agus Salim, dan sebagainya. Panjangnya sejarah dan berbagai kejadian yang mengiringi perjalanan bangsa Indonesia, hingga akhirnya membawa bangsa Indonesia sulit untuk melepaskan diri sebagai bangsa yang beridentitas dan dilabeli masyarakat yang beragama. Pandangan tersebut akhirnya membawa pada pemisahan antara kewargaan dan Islam. Munculnya berbagai buku yang berlatar belakang Islami, kemudian pariwisata islami yang diikuti dengan fashion serta perbankan Islami. Terlebih menjelang pemilihan umum mendatang, memungkinkan iklim demokrasi hadir dengan berbagai ekspresi.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh CRSC atau *Center for Religious and Cross Culture* pada tahun 2011 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dihasilkan bahwa dengan semakin banyaknya simbol Islam diruang publik sebagai sinyal positif harapannya tidak mengancam masa depan bangsa Indonesia. Hal ini pentingnya pemikiran yang inklusif, kritis, responsif serta moderat dalam permasalahan sosial-agama saat-saat masa pemilihan umum (Hasan, Noorhaidi dan Abu Bakar, 2011).

Dalam hasil penelitian tersebut, yang patut dikhawatirkan adalah gerakan yang mengatasnamakan "islamisme-ideologis", yaitu sebuah metode yang digunakan dengan cara memaksa serta mengklaim kebenaran sepihak. Banyaknya politik kekerasan yang disimbolkan dengan Islam dapat memperburuk substansi ajaran agama. Sudah seharusnya pemilihan umum dilaksanakan dengan secara rahmah, menampilkan bentuk toleransi serta wajah moderat. Bukan menunjukkan dengan sikap egois dan kekerasan untuk mengancam orang lain yang memiliki pendapat berbeda. Jika hal ini masih terus berlangsung, maka wujud yang ditampilkan dari identitas Islam yaitu penuh dengan gerakan ancaman dan aksi kerasnya (Muthohirin, 2019).

Persepsi Mahasiswa PBA Tentang Politik Identitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester dua tentang sudut pandangannya mengenai politik identitas dalam pemilihan umum.

1. Menurut M. Azlan Al-Mubarak saat ini politik identitas Islam sangat memainkan peran penting dalam persiapan pemilihan umum tahun 2024. Perbedaan keberagaman yang timbul dalam masyarakat dapat memberikan pengaruh apabila terdapat calon pemimpin yang membawa identitas agama dalam melakukan kampanye. Hal ini disebabkan, masyarakat terkadang mudah sekali terbawa oleh giringan opini yang berkembang. Seperti, memiliki agama yang baik, berasal dari keluarga terpandang dan berpendidikan serta agama yang sama antara pemilih dengan calon terpilih. Menurutnya, aspek dari politik identitas ini juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum, sehingga pentingnya upaya yang disiapkan para pemilih pemula dalam menolak politik identitas. Upaya yang perlu dilakukan dapat berasal dari internal masing-masing mahasiswa untuk tidak mudah terbawa provokasi dan simbolisasi yang ditawarkan oleh pihak lain.
2. Nourma Azizah, ia menyampaikan bahwa adanya politik identitas Islam dapat berpengaruh terhadap kesatuan sosial dimasyarakat. Jika politik identitas Islam terus menyebar tanpa adanya penanggulangan, maka akan melemahkan tatanan masyarakat yang sudah berdiri dengan penuh harmonisasi. Menurut nourma, peran media sosial saat ini juga sangat mempengaruhi dalam memperkuat politik identitas. Mudahnya akses media digital saat ini juga dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk berselancar di dunia maya, jika mahasiswa tidak menyaring bacaan yang telah diperolehnya maka akan menggiring informasi yang salah.
3. Anisa Aqly memberikan pandangannya tentang politik identitas Islam menjelang pemilihan umum, menurutnya dalam pemilihan umum kepentingan pribadi atau simbolisasi dari kelompok harus dapat dipisahkan. Sebaiknya hal yang dilakukan dalam melakukan kampanye yaitu mengunggulkan visi serta misi dari calon pemimpin. Tujuannya agar masyarakat memahami karakteristik dari konstanta pemilu dan bukan hanya memainkan isu politik identitas Islam yang mengakibatkan keadaan demokrasi semakin memanas.

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh beberapa mahasiswa diatas dapat dipahami bahwa, adanya isu politik identitas Islam yang menggunakan isu kekerasan atau digunakan secara berlebihan maka akan sangat berpotensi memunculkan konflik serta perpecahan dalam masyarakat. Jika politik identitas Islam dibiarkan tumbuh berkembang dalam keseharian kelompok masyarakat serta saling menjatuhkan satu dengan lainnya maka besar dampaknya dapat merusak keutuhan NKRI serta kebhinekaan (Kiftiyah, 2019). Dalam hal ini perlunya kontrol dari pemerintah untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat menjelang pemilihan umum tahun 2024.

Upaya Mewujudkan Pesta Demokrasi Yang Damai

Berdasarkan periode tanggal 21 Januari 2021 yang bersumber pada Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperkuat oleh survei litbang Kompas yaitu bulan Oktober 2021 tercatat bahwa usia produktif akan mendominasi pemilihan umum tahun 2024. Dimana rentan usia produktif antara 15-64 tahun telah tercatat mencapai 191,08 juta jiwa atau sekitar 70,82% dari seluruh total penduduk jiwa yang saat ini berada pada jumlah 270,20 juta. Penduduk usia muda dengan usia rentan 0-14 tahun mencapai 23,33% atau sekitar 63,03 juta jiwa serta penduduk yang dalam usia lanjut berada pada 9,78% (Muhammad Haris Zulkarnain, 2021). Dukungan dan partisipasi dari pemilih usia produktif ini dapat menjadi kunci serta solusi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pentingnya mewujudkan asas demokrasi dalam memilih juga harus dapat diterapkan. Tidak memandang latar belakang ekonomi, fisik serta identifikasi lainnya.

Sebagai mahasiswa yang termasuk dalam rentang usia produktif, maka partisipasinya dalam pemilihan umum sangat mempengaruhi dalam kesuksesan pemilu. Melalui sistem demokrasi, maka dapat



memberikan kesempatan pada rakyat untuk menilai lebih dekat terhadap kebijaksanaan negara serta menjadi penentu pemimpin rakyat selanjutnya. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang damai antara lain; *pertama*, mengedepankan nilai persatuan serta kesatuan dalam realitas bersosial. *Kedua*, perlunya informasi yang tepat melalui sumber informasi terpercaya agar tidak mudah tergiring opini yang belum jelas kebenarannya (Sahari, 2021). *Ketiga*, menjunjung tinggi seluruh perbedaan dalam masyarakat dan tetap menjaga semangat Pancasila sebagai landasan dalam bernegara. *Keempat*, membantu dalam mensosialisasikan tindakan anti rasisme dan diskriminasi baik di media sosial maupun secara langsung pada masyarakat. *Kelima*, mengedepankan akhlak sebelum melakukan tindakan dan menyikapi suatu masalah (Amrullah & Kahar, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Pemilu 2024 menjadi kesempatan baik bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama bagi pemilih pemula yaitu mahasiswa. Bukan hanya terpilihnya pemimpin yang bijaksana, namun kesuksesan dalam mewujudkan demokrasi yang luas juga menjadi harapan yang sangat dinantikan. Fenomena munculnya politik identitas Islam dalam isu kampanye maka dapat memberikan dampak buruk dalam keharmonisan bangsa. Berbagai tindakan seperti mempersekusikan pihak yang memiliki perbedaan pendapat, menyebarkan ujaran kebencian, dan mudah emosional seharusnya dapat dihindari demi terciptanya pemilihan umum yang berkualitas. Peran ini tidak hanya dibebankan pada mahasiswa sebagai aktor terdepan dalam pemilihan umum, namun juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memilih pada tahun 2024. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan berdampak pada perpecahan bangsa Indonesia, maka pentingnya kerja sama dalam menciptakan persepsi dan pelaksanaan politik yang bebas dari kepentingan kelompok. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang telah dilakukan dengan lebih mengeksplorasi obyek penelitian dan metode dalam pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, U., & Kahar, S. (2019). Pengaruh Politik Identitas Pada Pemilihan Presiden 2019 (Survey Terhadap Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara). *Kawasa*, 9(2).
- Anam, H. F. (2019). Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Politea*, 2(2), 181. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5953>
- Hasan, Noorhaidi dan Abu Bakar, I. (ed. . (2011). *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*.
- Irwan, S. (2019). Islam Dan Politik Identitas Islam, Studi Tentang Pemahaman Nilai-nilai Pendidikan. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 15(2).
- Khakim, M. S., Nugraha, A. F., Sukanti, S., & Sarwedi, A. R. (2020). Kontribusi Mahasiswa Daerah Dalam Penanganan Intoleransi Melalui Sinergi Perguruan Tinggi Di Diy. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 62. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8361>
- Kiftiyah, A. (2019). Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Indonesia Reconciliation Efforts of Identity Politics Post of Election 2019 in Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1), 63–75.
- Mali, F. X. G. . (2021). Politik Identitas Pada Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 9(2), 229–259.
- Muhammad Haris Zulkarnain, A. S. (2021). Jurnal bawaslu provinsi kepulauan riau. *JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU*, 3(2).
- Muthohirin, N. (2019). Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 47–56. <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8776>
- Sahari, A. F. P. A. (2021). *Pendidikan Politik dan Isu Agama dalam Pilpres (Studi pada Mahasiswa IAIN Manado dan UIN Makassar) Andi Fikra Pratiwi Arifuddin*. 25(1), 44–59.
- Saputro, A. (2018). Agama Dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019. *ASKETIK*, 2(2).